BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat MABES TNI-AL

Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada jaman pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal - kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.

Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata

diberbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Kepahlawanan prajurit samudera tercermin dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi. Keterbatasan dalalm kekuatan dan kemampuan menyebabkan ALRI harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan militer Belanda dan Sekutu. Sebutan ALRI Gunung kemudian melekat pada diri mereka. Namun demikian tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut. Dalam masa sulit selama Pereang Kemerdekaan ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur - unsur tersebut menandai kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.

Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 ALRI berhasil

menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI melai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun - tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain.

Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada tahun 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan

menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) klas 'Skory', fregat klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut - sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia.

Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora dogelar, kapal - kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.

Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajutir - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini.

Sementara unsur - unsur laut menggelar pameran bendera dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara - negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G 30 S/PKI.

Sejak tahun 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor - Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal - kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI - Uni Sovyet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. Oleh karena itu TNI AL beralih mengadopsi teknologi Barat untuk memodernisasi kekuatan dan kemampuannya dengan membeli kapal - kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, diantaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah'dari Belanda, Fregat berpeluru kendali klas 'Van Speijk' eks- AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman

Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas'Patrol Ship Killer' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim 'Nomad-Searchmaster'eks-Angkatan Bersenjata Australia.

Pada saat yang sama TNI AL mengembangkan militer non tempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan dibidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Negara Amerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakan pembangunan sektor kelautan jauh sebelum Departemen Kelautan terbentuk, khususnya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut. Kegiatan - kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan - badan pengkajian pembangunan kelautanbersama - sama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yangterangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi KekuatanMaritim (Binpotnaskuatmar). Dalam rangka menggelorakan jiwa bahari bangsa, TNI AL menggelar event kelautan skala internasional yaitu Arung Samudera 1995 yang berintikan Lomba Kapal Layar Tiang Tinggi dan perahu layar. TNI AL juga menjadi pendukung utama dicanangkan Tahun Bahari 1996 dan Deklarasi Bunaken 1998 yang merupakan manifestasi pembangunan kelautan di Indonesia.

Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal - kapal perang jenis korvet klas 'Parchim', kapal pendarat tank (LST) klas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau klas Kondor.Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih - lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila - flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembenahan - pembenahan tersebut merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju Hari Esok yang Lebih Baik.

2.2 Strategi Pengolahan Perusahaan Secara Umum

2.2.1 Visi dan Misi

VISI TNI AL

Terwujudnya tni angkatan laut yang besar, kuat dan profesional sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara di laut.

MISI TNI AL

1. Melindungi dan menjaga keutuhan dan integritas bangsa dan negara
2. Menegakkan kedaulatan dan keamanan di laut.

3. Mengamankan dan memperlancar pembangunan nasional khususnya pembangunan kelautan
4. Mewujudkan postur TNI AL yang besar, kuat dan profesional
5. Ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui diplomasi angkatan laut

2.2.2 Logo TNI AL

Bentuk dan Makna Logo TNI AL



Gambar 2.1 Logo TNI AL

- Bentuk jangkar dari logo melambangkan : Alat untuk Berlabuh/Berhenti Kapal Ditengah Laut dalam Keadaan Darurat
- Tulisan JALASVEVA JAYAMAHE artinya Dilaut Kita Jaya, Didarat Kita Menang

2.2.3 Tugas Pokok TNI AL

1. Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional.
2. Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional.
3. Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

❖ **FUNGSI TNI AL**

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut dan Proyeksi Kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

1. Pengendalian Laut. Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

2. Proyeksi Kekuatan, terbagi ke dalam :

   a) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut .

   b) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara,

❖ **PERAN TNI AL.**

1. Peran Militer (Military/Defence).

Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan ; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ; melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukan iktikad damai terhadap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

2. Peran Polisionil (Constabulary).

Peran Polisionil TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan

dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3. Peran Dukungan Diplomasi (Diplomacy Supporting).

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Secara tradisional, angkatan laut menunjukan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (Confidence Building Measures/CBM). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat,

serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

4. Peran Lainnya.

Disamping tiga peran di atas, TNI AL juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (Military Operations Other Than War) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, search and rescue, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan

2.2.4 Doktrin TNI AL

Definisi paling sederhana, doktrin adalah suatu ajaran". Sedangkan definisi umum tentang Doktrin Militer adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh militer sebagai pedoman untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu istilah doktrin yang dimaksudkan disini adalah doktrin militer. Doktrin bukanlah seperangkat aturan-aturan yang penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melainkan merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami hakekat konflik bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Tujuannya adalah untuk membimbing, menjelaskan dan mengajarkan, serta menyediakan dasar untuk diskusi dan studi lebih lanjut.

1. Hakekat Doktrin

Doktrin adalah pokok pemikiran yang menyangga kebijakan pertahanan. Doktrin bersifat menerangkan dan menjelaskan, sedangkan kebijakan bersifat

mengarahkan dan menentukan. Landasan doktrin adalah sejarah, dan kewenangannya diperoleh melalui pengalaman yang bermacam-macam. Sekalipun doktrin sudah teruji oleh sejarah dan pengalaman, bukan berarti doktrin tidak boleh diubah. Doktrin berkembang sebagai respon dari perubahan politik atau latar belakang strategi, atau sebagai hasil dari teknologi baru. Doktrin mempengaruhi jalan yang ditempuh dari kebijakan dan perencanaan yang akan ditetapkan, demikian pula akan mempengaruhi bagaimana kekuatan militer akan diorganisasikan dan dilatih, serta bagaimana cara memperoleh peralatan yang dibutuhkan.

2. Arti Penting Doktrin

Doktrin memiliki arti sangat penting, karena pemahaman terhadap doktrin dapat membantu memperjelas pemikiran untuk memutuskan cara bertindak pada situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis atau perang. Doktrin memberikan bimbingan dan latihan konsistensi bersikap dan berperilaku, kebersamaan dan saling mempercayai, untuk menghasilkan suatu tindakan kolektif yang wajar dan benar. Di samping itu, doktrin dapat mengarahkan organisasi atau komando untuk menjamin keterpaduan pencapaian sasaran.

3. Sejarah Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya telah menggariskan landasan sejarah dari peran Angkatan Laut di dunia, hal mana merupakan fakta dari sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan

lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu conditiosine quanon.

Doktrin formal TNI AL dimulai dengan diresmikannya Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya berdasarkan Keputusan Menteri / Panglima ALRI Nomor : 5000.1 pada tanggal 17 Agustus 1965, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tahun 1965 itu juga. Esensi dari Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya adalah semangat perjuangan Angkatan Laut pada waktu itu, setelah keberhasilan perjuangan bangsa dalam membebaskan Irian Jaya dilanjutkan masuk dalam kancah konfrontasi dengan Malaysia. Oleh karena itu nuansa Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya tahun 1965 adalah nuansa membangkitkan semangat perjuangan. Eka Sasana Jaya tahun 1965 itu juga dimaksudkan sebagai Doktrin Keamanan Revolusi Indonesia, sebagai Doktrin Kekaryaan ALRI, dan sebagai Doktrin Bahari Indonesia.

Sebelum itu, sebenarnya sudah ada publikasi-publikasi resmi ALRI yang digunakan sebagai Petunjuk Tempur. Secara formal belum disebut sebagai suatu doktrin, namun pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik, misalnya Prosedur Operasi Amfibi, Operasi Anti Kapal Selam, maupun prosedur Bantuan Tembakan Kapal dan Bantuan Tembakan Udara. Di samping itu, pemikir

ALRI pada waktu itu juga berhasil merumuskan suatu pedoman sikap mental dan tingkah laku prajurit, yaitu Trisila Angkatan Laut. Konsep Trisila dicetuskan oleh Laksamana Muda TNI Anumerta Yos Sudarso pada tahun 1956 ketika almarhum masih berpangkat Mayor, dan didiskusikan bersama rekan-rekannya antara lain Laksamana Mursalim dan Laksamana Mulyadi yang waktu itu masih berpangkat Kapten. Trisila yang terdiri dari ; Disiplin, Hirarki dan Kehormatan Militer, tidak bertentangan dan justru bersumber dari Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI, dan merupakan suatu konsepsi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan, sumber semangat Korps, serta mendorong terciptanya kehidupan Khas TNI AL sesuai medan juangnya di laut yang begitu unik dan berat.

Istilah "doktrin" bagi TNI/ABRI mulai digunakan lagi sejak tahun 1982 ketika diresmikan Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara bagi TNI/ABRI pada waktu itu, yang kemudian dimantapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988 disahkan Doktrin Catur Dharma Eka Karma berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/04/II/1998 tanggal 27 Februari 1988, yang dimaksudkan sebagai Doktrin Induk bagi TNI/ABRI. Selanjutnya pada tahun 1991 disahkan Doktrin Pertahanan Keamanan Negara berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor : Kep/17/X/1991 tanggal 5 Oktober 1991, dimaksudkan sebagai Doktrin Dasar TNI/ABRI. Kemudian pada tahun 1994 diresmikan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti berdasarkan Keputusan

Pangab Nomor : Kep/05/III/1994 tanggal 21 Maret 1994, sebagai Doktrin Pelaksana TNI/ABRI. Sampai akhir dekade 90-an, TNI/ABRI disatukan dengan tiga buah doktrin level strategi ; Doktrin Dasar adalah Doktrin Hankamneg 1991, Doktrin Induk adalah Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988, dan Doktrin Pelaksanaannya adalah Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994.

Dengan disatukannya TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam ABRI dan digunakannya Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988 sebagai Doktrin Induk serta Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994 sebagai Doktrin Pelaksanaan, masing-masing doktrin angkatan otomatis tidak digunakan lagi. Doktrin Induk maupun Doktrin Pelaksanaan dijabarkan di masing-masing angkatan berupa Buku-Buku Petunjuk. Di TNI AL Buku-Buku Petunjuk tersebut dijabarkan dan ditata dalam suatu stratifikasi : Buku Petunjuk Dasar (PUM-1), Buku Petunjuk Induk (PUM-1.01 s/d PUM-1.13), dan Buku Petunjuk Pembinaan maupun Buku Petunjuk Operasi, kesemuanya pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik.

Perubahan situasi politik dan pemerintahan pada tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan penataan fungsi dan peran TNI berdasarkan paradigma baru TNI, antara lain perubahan ABRI kembali menjadi TNI dan lepasnya Polri dari ABRI, kemudian dihapuskannya Dwifungsi ABRI, mendorong masing-masing angkatan untuk merevisi dan menata kembali doktrin angkatan maupun publikasi-publikasi resmi yang digunakan dalam Pembinaan, Pengembangan, dan Penggunaan Kekuatan. Untuk TNI AL penyusunan doktrin angkatan bertitik tolak dari pengertian doktrin militer yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia, dengan mengadopsi pandangan-pandangan dari para pemikir doktrin

maritim maupun doktrin militer, baik di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Pandangan-pandangan dari pemikir strategi maritim tingkat dunia semacam Alfred Thayer Mahan dan Sir Jullian Corbett bagaimanapun juga tetap mewarnai esensi dari doktrin TNI AL, di samping pemikir strategi maritim tingkat nasional seperti almarhum Laksamana Muda TNI Suwarso MSc yang hasil karya berupa kumpulan tulisan-tulisannya sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu referensi utama oleh TNI AL.

4. Garis Besar Isi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

a) Tentang Lingkungan Laut dan Sifat Dasar Kekuatan Laut. Bab pertama ini menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan lingkungan laut dan lingkungan strategis maritime yang mendasari dimensi strategi militer, ruang tempur multi dimensi dan atribut kekuatan laut.

b) Tentang Perang dan Konflik Bersenjata. Bab selanjutnya membahas tentang hakekat perang dan konflik bersenjata dalam suatu dimensi konflik. Hal ini menyebabkan konflik di dunia modern terbagi ke dalam macam-macam konflik serta eskalasi dan tingkatan konflik. Dengan demikian peperangan laut juga akan terbagi pada tingkatan komando dan perencanaan serta hubungannya dengan konvensi internasional.

c) Tentang Konsepsi Pertahanan Negara di Laut. Bab ini mengulas makna laut bagi bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan konsepsi dasar pertahanan negara. Konsepsi ini juga mewadahi kepentingan nasional serta fungsi dan peran angkatan laut yang dituangkan ke dalam pkok-pokok

pertahanan laut nusantara. Penerapan konsep ini dibatasi dengan kawasan operasi/focal area tertentu sebagai mandala perang dan sejalan dengan konsep pelibatan dan daerah latihan sesuai prinsip-prinsip perang laut.

d) Tentang Kekuatan dan Kemampuan Maritim. Bab berikutnya memberikan gambaran bagaimana kekuatan dan kemampuan maritim diproyeksikan menjadi kemampuan TNI AL sekaligus implementasinya dalam bentuk kemampuan operasi di laut.

e) Tentang Pokok-pokok Penggunaan Kekuatan Laut. Bab ini mengalir dari kemampuan operasi di laut oleh TNI AL dalam penggunaan pada tugas perang dan penggunaan tugas non perang.

f) Tentang Perencanaan dan penyelenggaraan Operasi dan Kampanye Maritim. Bab ini menjabarkan tujuan strategi militer yang ingin dicapai memanfaatkan seni operasi. Tujuan ini dicapai melalui kampanye maritim yang didahului dengan suatu proses perencanaan yang terpadu dan terinci sesuai tahapan kampanye maritim.

g) Tentang Komando Pengendalian dan Dukungan Logistik. Bab terakhir ini menjelaskan masalah komando dan pengendalian pada saat operasi laut berlangsung untuk mendukum kampanye maritim, disinggung mengenai komunikasi dan elektronika serta dukungan logistik yang dapat diberikan.

5. Stratifikasi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya. Doktrin ini adalah Doktrin TNI AL yang menjadi landasan bagi doktrin-doktrin lainnya yang diwujudkan dalam Buku-buku Petunjuk dan digunakan pedoman oleh jajaran TNI AL. Posisi Doktrin ini

dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, digambarkan pada Lampiran "A". Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya menjelaskan lingkungan laut dan sifat dasar kekuatan laut, perang dan konflik bersenjata, konsepsi pertahanan negara di laut, kekuatan dan kemampuan maritim serta memberikan gambaran bagaimana kekuatan TNI AL dapat memberikan kontribusinya untuk pertahanan negara. Ini searah dengan bagaimana kemungkinan kekuatan tempur dapat digunakan, dalam hubungannya dengan masing-masing angkatan maupun dengan komponen bangsa lainnya, untuk masa sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.

2.2.5 Sistem Jaringan Telekomunikasi Militer TNI AL

Komunikasi adalah cara untuk bertukar informasi. Manusia telah mengenal komunikasi semenjak keberadaannya di dunia. Anak-anak telah diajar untuk berkomunikasi sejak kecil.Bila mereka tidak mampu berkomunikasi secara biologis atau sosiologis maka dianggap berbeda dari manusia lainnya.Sifat manusia sebagai mahluk sosial membuat manusia sangat membutuhkan komunikasi.

Secara umum manusia menggunakan dua panca indera untuk berkomunikasi, yaitu pendengaran dan pengelihatan. Karena itu alat komunikasi yang dikenal dan dikembangkan oleh manusia berdasar pada kedua panca indera tersebut. Mulai bahasa mulut, tubuh, tulisan, gambar, telepon, televisi, dan sebagainya.

Telekomunikasi

Telekomunikasi didefinisikan sebagai ilmu berkomunikasi antar jarak dimana cara-cara umum berkomunikasi seperti perkataan dan pengelihatan tidak memungkinkan. Metode yang telah lama dan biasa digunakan dalam telekomunikasi adalah penggunaan sinyal elektronika. Sinyal elektronika ini dipancarkan melalui kabel atau udara bebas. Pada saat ini penggunaan sinyal cahaya yang dibawa melalui fiber optik merupakan alternatif lain. Sinyal telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah sinyal analog (kontinu). Sinyal ini digunakan dalam telepon, yang ditemukan pada 1876 oleh Alexander Graham Belt. Telepon merubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, ditransmisikan melalui jaringan telepon, kemudian dirubah kembali menjadisuara.

Kelas kedua adalah sinyal digital (diskrit). Yang perkembangannya dimulai seiring dengan perkembangan komputer. Sinyal ini memungkinkan berkomunikasi dengan dan antara komputer. Teori informasi yang dikembangkan oleh C. K. Shannon semenjak 1948, sangat berguna dalam komunikasi sinyal digital. Keunggulan dan sinyal digital adalah daya guna, kemampuan dan keamanan yang lebih baik. Pada masa sekarang, teknologi modern membuat telekomunikasi dengan sinyal digital lebih fleksibel dan terjamin, dibandingkan sinyal analog. Sehingga menjadi hal yang umum untuk merubah sinyal analog menjadi digital. Selain itu penggunaan satelit untuk telekomunikasi internasional lebih dipilih daripada penanaman kabel bawah laut.Komunikasi dalam Rantai komando.

Militer merupakan sebuah organisasi yang memakai sistem rantai komando dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Sistem ini sangat mengandalkan komunikasi yang baik, jelas dan aman, baik antara atasan dengan bawahan maupun rekan sejawat.Pusat komando dianggap gagal bila tidak mampu menyediakan informasi penting kepada pejabat berwewenang dan sebaliknya. Komunikasi yang buruk dan tidak dapat dipercaya berarti menghilangkan kepercayaan terhadap informasi yang dikirim. Tanpa informasi yang dipercaya, komandan tidak dapat membuat keputusan yang tepat pada waktunya. Ada tiga unsur penting dalam komunikasi militer Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada waktu tepat, cermat, dapat dipercaya dan aman. Jaringan komunikasi harus mampu mengirimkan informasi untuk memelihara orang tetap dalam lingkaran. Jaringan harus mampu menyelesaikan tugasnya dalam berbagai lingkungan dan pada semua tingkat sengketa.

Karena itulah komunikasi bagi militer dapat menjadi keunggulan ataupun kekurangan dalam pelaksaan tugas.Perang Elektronika (Electronic Warfare). Perang elektronika (Pernika) didefinisikan sebagai usaha-usaha. militer yang melibatkan penggunaan energi elektromagnet (EM) untuk deteksi, eksploitasi atau menghalangi kegiatan lawan dalam memanfaatkan spekrum EM dan sebaliknya, menggunakan spektrum EM tersebut untuk kepentingan sendiri. Istilah ini mulai muncul semasa Perang Dunia II. Dimana masa itu merupakan awal perkembangan teknologi elektronika sebagai bagian integral dan persenjataan .

Secara umum kegiatan Pernika dapat dibedakan berdasar sifat-sifatnya sebagai

berikut :

a) Tindakan-tindakan pengukuran pasif (Passive Measure).
b) Tindakan-tindakan pengukuran aktif (Active Measures).
c) Tindakan-tindakan pengukuran balasan (Counter Measures)

Sedangkan berdasarkan tujuannya. Pernika dibagi menjadi :

1. Electronic Support Measure(ESM)

   Diartikan sebagai tindakan pengukuran bantuan elektronika. Kegiatan ini menggunakan pancaran-pancaran lawan atau kawan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan elektronika pasif. Antara lain Intercept, Direction Finding, Classification, Identification, Recording dan Homming

2. Electronic Counter Measure(ECM)

   Tindakan pengukuran balasan elektronika. Kegiatan ini menggunakan pancaran-pancaran masuk sebagai referensi untuk kerja (aktif) peralatan kita. Kegiatan ini meliputi Jamming dan Deception.

3. Electronic Counter Counter Measure (ECCM)

   Tindakan pengukuran balasan terhadap balasan elektronika. Kegiatan ini merupakan usaha mencoba menjamin atau melindungi penggunaan spectrum EM kita sendiri. Serta mencoba meniadakan ESM dan ECM musuh. kegiatan ini antara lain Emmision Policy, Emmision Security, Anti jamming, Anti Deception.

Robert A. Frosch mengemukakan bahwa perkembangan penggunaan ruang lingkup elektromagnet merupakan hal luar biasa yang terjadi dalam sistem

pertahanan Amerika Serikat. Ia membagi masa perkembangan tersebut menjadi :

1. Masa Nol (Zero era) adalah kurun waktu dimana ketika tidak ada Radar dan komunikasi EM.
2. Masa Pertama (First era) adalah kurun waktu dimana terdapat radar dan komunikasi elektronik tetapi tidak ada peralatan ECM.
3. Masa Kedua (Second era) adalah kurun waktu dimana dimulai penemuan peralatan ECM.
4. Masa Ketiga (Third era) adalah kurun waktu dimana terdapat penemuan peralatan ECCM. Teknologi yang membuat kita kebal terhadap tindakan lawan.
5. Masa Keempat (Fourth era) adalah masa dimana ESM, ECM, dan ECCM tidak dapat dibedakan lagi dan teknologi EM dimainkan sebagai sistem operasi tunggal.

Pada sistem pertahanan Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, kegiatan pernika berada di dalam suatu wadah yang disebut Pusat Analisa Intelejen Sinyal (PAS). Didalamnya tergabung semua komponen Radar, Foto, Elektronika dan KomunikasiIntelejen. Jelaslah teknologi Elektromagnetik pada jaman modern ini merupakan bagian utama dalamsistempertahanan. Telekomunikasi dalam Militer Telekomunikasi dalam dunia militer sebagai bagian dari pernika dan komunikasi komando, menjadi bagian penting dari sistem pertempuran. Telekomunikasi tersebut harus efisien, efektif dan aman untuk segala medan dan tingkatan persengketaan. Berikut ini beberapa contoh dari teknik dan sistem telekomunikasi

militer.

Mobile Subcriber Elektonic (MSE) merupakan suatu jaringan komunikasi taktis digital penuh, aman dan bekerja otomatis untuk digunakan pada tingkat korps dan divisi. Sistem ini menyalurkan suara, data, teletype, dan facsimile. MSE sering digambarkan serupa dengan sistem telepon selular. Teknik Jamming dan penyadapan sinyal berkembang pesat dengan digitalisasi dan mikro prosesing. Frekuensi pengganti memberi perlindungan anti jamming. Kemungkinan kecil terjadinya penyadapan tercapai dengan ancryption pengelolaan daya dan pengarahan antena yang digandakan dengan teknik transmisi burst. Microminiaturization memungkinkan pembuatan radio tempur mini yang mudah dibawa-bawa untuk keperluan anti jamming. Dalam mengejar pengembangan Low Probability of Intercept (LPI), perancang bekerja atas prinsip pengelolaan daya, arah antena, propagasi gelombang radio dan proses sinyal. Dalam pengelolaan daya, pemanfaaatan antena utama secara maksimum harus dilengkapi emisi yang rendah. Selain itu semakin kecil daya pancar, semakin kecil pula kemampuan intersepsi. Dalam propagasi, fenomena alamiah seperti penyamaran medan dari pandangan propagasi dan penyerapan atmosfir bumi serta pelemahan frekuensi tertentu, mendukung LPI. Disini spektrum tersebar (spread spectrum) transmisi digital mengarah ke pengembangan LPI. Spektrum tersebar mengunakan lebar gelombang yang sejuta kali lebih lebar dari yang diperlukan untuk membawa informasi. Hal itu tercapai dengan penyandian suara buatan (pseudo noise coding) dari frekuensi digital.

Beberapa bagan modulasi digunakan dewasa ini modulasi direct squence

dipakai pada sistem komunikasi pertahanan, lompatan frekuensi (frequency hopping) serta lompatan waktu (time hopping) digunakan dalam sistem radio saluran tunggal darat-udara AD AS. Dikembangkan juga modulasi FM-pulsa serta sistem hybrid. Jaringan darurat gelombang bunyi (GWEN = groundwave emergency network) menyediakan kemampuan memelihara jaringan hubungan komunikasi jarak jauh yang kritis di daratan AS bagi satuan strategis. Sistem komunikasi satelit AU AS (AF Sat Com) bekerja pada UHF, dengan tekanan yang dapat dipercaya, digunakan sebagai saluran teletype kecepatan rendah.

Komunikasi HF long houl mengutamakan penggunaan gelombang udara untuk perambatan. Perambatan gelombang udara terjadi apabila radiasi HF diarahkan untuk menabrak ionosfer dan dipantulkan kembali. Tetapi karena ionoster selalu berubah, komunikasi HF tidak pernah terjamin. Namun dengan menggunakan model komputer modern, komunikasi tersebut dapat berhasil. Teknik yang diadaptasi mencakup step sounding, modulasi elektron tersebar, kecerdasan frekuensi dan lompatan frekuensi. Sebagai mahluk sosial manusia sangat membutuhkan komunikasi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan manusia untuk mengembangkan telekomunikasi. Di dalam dunia militer perkembangan ini dimulai semenjak Perang Dunia II. Di jaman sekarang, komunikasi militer dengan dukungan teknologi telekomunikasi, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer.

2.2.6 Rencana Pembangunan Kekuatan TNI AL Jangka Panjang

Rencana pembangunan kekuatan TNI AL jangka panjang

a. Geografi merupakan faktor fundamental dalam penyusunan strategi pertahanan negara (geostrategi), dimana dasar filosofi ini telah ditegaskan secara yuridis melalui Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu bahwa “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Dasar filosofi dan yuridis inilah yang seharusnya menjadi titik awal pemikiran untuk selanjutnya diterjemahkan ke bidang teknis kemiliteran secara konsisten, sistematis dan terukur, sehingga diperoleh bentuk strategi dasar (*basic strategy*) guna mempertahankan suatu ruang wilayah. Strategi dasar tersebut harus pula mampu memberikan gambaran riil bentuk “arsitektur makro” strategi pertahanan yang dimaksud di atas peta, sehingga benar-benar dapat diaplikasikan utamanya bila berorientasi pada masa perang. Disamping itu, diharapkan otoritas pilar politik dan ekonomi negara serta komponen bangsa lainnya dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana pertahanan ruang laut Indonesia diselenggarakan.

b. Layaknya membangun sebuah rumah maka strategi pembangunan kekuatan (Bangkuat) harus pula mengacu kepada gambaran “arsitektur makro” sehingga penyelenggaraannya dapat terarah serta diharapkan berjalan secara berkesinambungan. Dengan adanya “arsitektur makro” maka permasalahan pokok tahapan strategi pembangunan kekuatan

adalah terletak pada daya dukung anggaran pertahanan negara untuk memenuhi kebutuhan Alat Utama dan Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL dalam komposisi yang proporsional, dihadapkan kepada kebutuhan pertahanan dan keamanan negara di laut menyangkut *balance of power* di regional sebagai orientasi utama, serta dihadapkan kepada ancaman faktual di laut sebagai orientasi yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu disusun Rancangan Postur Kekuatan TNI AL Tahun 2005 hingga 2024 dengan sebijaksana mungkin berdasarkan yang komprehensif.

c. Selanjutnya “arsitektur makro” digunakan pula sebagai acuan bagi tahapan strategi penggunaan kekuatan (Gunkuat) untuk menyelenggarakan rencana penyebaran kekuatan (*deployment*) dan penggelaran kekuatan (*employment*).

Dimasa damai, deployment perlu disiapkan agar aplikasi employment strategi dasar pertahanan ruang laut Indonesia yang berorientasi pada masa perang dapat diselenggarakan secara optimal. Oleh sebab itu, rencana pembangunan kekuatan TNI AL perlu disusun mulai dari strategi pembangunan kekuatan sampai ke strategi penggunaan kekuatan dalam suatu kesatuan.

2.2.7 Tinjauan Konstelasi Geografi Perairan Indonesia dan Penentuan Kebutuhan Alutsista TNI AL.

Geografi Perairan Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi akibat pengaruh dua benua dan dua samudera sehingga perlu diklasifikasikan secara garis besar. Klasifikasi tersebut dibutuhkan untuk menentukan jenis Alutsista yang cocok dengan kondisi perairan setempat dan dengan demikian, kebutuhan Alutsista TNI AL secara keseluruhan dapat ditentukan. Proses peninjauan dan penentuan ini meliputi :

a. Konstelasi Geografi Perairan Indonesia.

Gambar 2.1 Karakter Perairan Indonesia

Keterangan

- Biru : Laut dalam (*deep water*), merupakan laut terbuka (open sea).
- Merah : Laut dangkal (*shallow water*) terdiri dari Dangkalan Sunda di Barat dan Dangkalan Sahul di Timur.
- Hijau : Laut dalam (*deep wate*r).

b. Kondisi Perairan Indonesia dan Kebutuhan Unsur-Unsur Pemukul TNI AL.

Kedua parameter ini memiliki korelasi yang kuat sehingga penentuan jenis unsur-unsur pemukul TNI AL akan tepat ruang dan tepat guna. Sementara itu unsur-unsur pemukul merupakan inti kekuatan dari militer dalam memenangkan perang sehingga perlu dibedakan dengan jenis unsur-unsur lainnya. Korelasi kondisi perairan Indonesia dan penentuan kebutuhan unsur-unsur pemukul TNI AL adalah sebagai berikut :

1) **Ruang Laut (*Sea Room*).** Ruang laut berpengaruh terhadap asas kebebasan bermanuver. Ruang laut perairan Indonesia sangat bervariasi dengan gambaran sebagai berikut :

   a) **Laut Terbuka (*Open Sea*).** Merupakan perairan yang berhubungan langsung dengan samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Karakter laut dan *operation requirement*-nya adalah : (Lihat Gambar 2.1 Warna Biru)

      (1) Tidak memungkinkan bagi pemanfaatan pulau-pulau, sehingga kebutuhan kualitas kesenjataan dan sensor menjadi tumpuan utama dan memiliki peranan yang menonjol. Disamping itu, kemenangan akan sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan Gugus Tugas laut secara *force on force* terhadap kekuatan Gugus Tugas laut musuh.

      (2) Tantangan alam besar, kondisi laut dapat mencapai lebih dari *sea state-5* dengan tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 2,5 m. Pada kondisi keseharian dalam keadaan normal, tinggi alun gelombang tanpa memecah dapat mencapai 2 m.

      (3) Jarak antar pangkalan *logistic support* yang menghadap ke laut terbuka relatif jauh, sehingga dibutuhkan unsur-unsur pemukul yang memiliki *endurance* yang cukup lama.

Dari kondisi tersebut maka *operation requirement* unsur-unsur tempur pemukul adalah kapal selam, kelas jenis Korvet, Fregate, Destroyer dan kelas diatasnya. Kapal standar Korvet, Fregate, Destroyer dan kelas diatasnya telah memiliki *Surface to Surface Missile* (SSM), *Surface to Air Missile* (SAM) dan

Torpedo sehingga mampu menghadapi ancaman udara, atas air dan bawah air.

b) Laut Setengah Terbuka (*Semi Close Water*). Laut setengah terbuka Perairan Indonesia meliputi Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Sulawesi dan Laut Arafuru. Karakter laut dan *operation requirement*-nya adalah :

(1) Di Selat Malaka, Laut Natuna serta sebagian Laut Arafuru dan Laut Sulawesi memungkinkan bagi pemanfaatan pulau-pulau guna menerapkan *Archipelagic Warfare.*

(2) Tantangan alam besar, terjadi pada puncak musim Angin Barat dan Angin Timur dimana kondisi laut dapat mencapai *sea state-5* dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 m.

(3) Jarak antar pangkalan *logistic support* relatif dekat sehingga kebutuhan dukungan logistik lebih mudah dilaksanakan.

(4) Di Selat Malaka, Laut Natuna dan Laut Arafuru merupakan laut dangkal (*shallow water*) (Lihat Gambar.1 Warna Merah), sehingga kecil kemungkinan adanya ancaman kapal selam musuh. Bilapun ada, dapat ditangkal dengan cara yang lebih ekonomis yaitu dengan penggunaan ranjau.

Dari kondisi tersebut maka *operation requirement* unsur-unsur tempur pemukul di Selat Malaka, Laut Natuna dan Laut Arafuru adalah kapal berukuran kecil dan dapat bergerak cepat dari jenis *Fast Patrol Boat* (FPB) yang dilengkapi dengan *Surface to Surface Missile* (SSM) dan *Surface to Air Missile* (SAM). Hal ini sudah cukup memadai dan lebih ekonomis, meskipun harus menghadapi Gugus Tugas laut musuh yang terdiri dari kapal jenis Korvet, Fregate dan kelas

diatasnya. Di Laut Sulawesi yang merupakan laut dalam (*deep water*) (Lihat Gambar 2.1 Warna Biru) membutuhkan kapal selam, kapal jenis Korvet, Fregate dan kelas diatasnya, dengan penekanan kemampuan deteksi bawah air dan torpedo guna mengantisipasi masuknya kapal selam musuh. Disamping itu dapat pula diterapkan cara lainnya yaitu taktik peperangan antar kapal selam (*submarine counter submarine*).

c) Laut Tertutup (*Close Water*). Laut tertutup meliputi semua Perairan Kepulauan Indonesia (*Archipelagic Water*). Karakter laut serta operation *requirement*-nya adalah :

(1) Optimal bagi pemanfaatan pulau-pulau dalam implementasi Peperangan Kepulauan (*Archipelagic Warfare*).

(2) Tantangan alam relatif kecil dan pulau-pulau dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap tantangan alam. Saat puncak musim Angin Barat dan Angin Timur kondisi laut dapat mencapai *sea state-5* dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 m. Laut Tertutup terbagi dalam dua jenis yaitu perairan dangkalan (Sunda dan Sahul) (Lihat Gambar.1 Warna Merah) serta perairan dalam di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur (Lihat Gambar 2.1 Warna Hijau).

(3) Jarak antar pangkalan *logistic support* relatif dekat sehingga kebutuhan dukungan logistik lebih mudah dilaksanakan.

Dari kondisi tersebut maka jenis unsur-unsur pemukul yang dibutuhkan adalah jenis kapal berukuran kecil dan dapat bergerak

cepat dari jenis *Fast Patrol Boat* (FPB). Untuk perairan dangkal dibutuhkan *Fast Patrol Boat Missile* (FPB-M) dan ranjau, sedangkan untuk perairan dalam dibutuhkan *Fast Patrol Boat Missile* (FPB-M), *Fast Patrol Boat Torpedo* (FPB-T) dan kapal selam.

2. **Kontur Dasar Laut** (*Sea Bottom Profile*). *Sea Bottom Profile* sangat berpengaruh kepada strategi peranjauan (*mining strategy*). Hampir setengah dari luas perairan Indonesia yang merupakan perairan dangkal, potensial bagi penerapan peranjauan (Lihat Gambar.1 Warna Merah). Meskipun demikian, bukan berarti seluruh perairan dangkal tersebut diranjau karena operasi peranjauan dilaksanakan menurut doktrin peranjauan. Tinjauan umum perairan Indonesia menurut sea bottom profile adalah :

   a) Pengaruh Kontinen.

   Pengaruh Kontinen membentuk dasar laut yang relatif rata / plat serta perairan dangkalan (*shallow water*) dengan kedalaman rata-rata kurang dari 100 m. Dangkalan yang terbentuk adalah Dangkalan Sunda, meliputi seluruh *Archipelagic Water* Indonesia bagian Barat dan ZEEI Laut China Selatan, serta Dangkalan Sahul yang meliputi Laut Arafuru. Karakter kontinental ini baik bagi strategi peranjauan (*mining strategy*) namun kurang kondusif bagi Kapal Selam. (Lihat Gambar 2.1 Warna Merah)

   c) **Pengaruh Samudera.**

   Pengaruh samudera membentuk relief dasar laut yang tidak beraturan serta merupakan perairan dalam (*deep water*) yang mencapai 200 m s/d

7000 m. Meliputi *Archipelagic Water* Indonesia bagian Tengah dan sebagian Indonesia Timur, serta ZEEI Laut Sawu dan Laut Sulawesi. Karakter samudera kondusif bagi Kapal Selam namun tidak memungkinkan bagi mining strategy. (Lihat Gambar 2.1 Warna Biru dan Hijau)

Dari penjelasan tersebut di atas maka kebutuhan TNI AL akan unsur-unsur pemukul meliputi kapal selam, kapal jenis Korvet, Fregate, Destroyer dan kelas diatasnya (berikut Heli Anti Kapal Selam *on board*), *Fast Patrol Boat Missile* (FPB-M), *Fast Patrol Boat Torpedo* (FPB-T) dan ranjau.

d. Kebutuhan Alutsista TNI AL Secara Entita.

Disamping unsur-unsur pemukul, dibutuhkan pula jenis Alutsista lainnya yang tidak kalah pentingnya. Untuk menentukan kebutuhan Alutsista TNI AL lainnya diterapkan pula beberapa pendekatan yaitu ; *Pendekatan Tugas* dimana untuk tugas pertahanan serta tugas penegakan keamanan dan hukum di laut membutuhkan jenis Alutsista yang berbeda ; *Pendekatan Doktrin* yaitu doktrin peperangan laut (*naval warfare doctrine*) bahwa unsur-unsur pemukul tidak dapat lepas dari unsur-unsur pendukung dan doktrin tentang *Naval Power Projection.* Oleh sebab itu TNI AL layaknya Angkatan Laut universal, menata berbagai jenis Alutsistanya dalam suatu susunan tempur standar yang terdiri dari :

1) **Susunan Tempur Pemukul (*Striking Force*).** Unsur pemukul terdiri dari *Submarine*/Kapal Selam, *Destroyer, Fregate* (Perusak

Kawal Rudal/PKR), *Corvet* (Perusak Kawal/PK), Helikopter Anti Kapal Selam, *Fast Patrol Boat-Torpedo* (FPB-T), *Fast Patrol Boat-Missile* (FPB-M), Buru Ranjau (BR) dan Ranjau Laut. Pada masa damai unsur pemukul digunakan dalam gelar operasi siaga tempur laut, diarahkan untuk penangkalan serta pengendalian laut sedangkan pada masa krisis/perangdiarahkan untuk melaksanakan tempur laut. Pada prinsipnya peran *constabulary* melekat pada semua KRI, sehingga di masa damai unsur-unsur pemukul jenis kapal atas air dapat digunakan secara proporsional untuk peran tersebut.

2) **Susunan Tempur Patroli (*Patrolling Force*).**

Unsur patroli terdiri dari *Fast Patrol Boat-Gun* (FPB-G), Kapal Patroli Cepat (PC-36 dan PC-40) dan *Maritime Patrol Aircraft* (MPA). Pada masa damai penggunaan unsur patroli diarahkan untuk mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk gangguan keamanan laut dan pada masa krisis/perang diarahkan bersama-sama unsur pemukul melaksanakan tempur laut.

3) **Susunan Tempur Dukungan (*Supporting Force*).**

Terdiri dari kapal Angkut Personel (BAP), Angkut Tank (LST), Tanker (BCM), Hidro-oseanografi (BHO), Kapal Markas (MA), Kapal Repair (BA), Kapal Tunda (BTD) dan Kapal Latih (LAT). Unsur-unsur pendukung diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap unsur-unsur pemukul dan unsur-unsur patroli.

Disamping itu, unsur-unsur bantu juga digunakan untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan (*civic mission*).

4) **Kesenjataan Marinir.**

Guna mendukung proyeksi kekuatan pasukan pendarat dibutuhkan Tank Amfibi, Panser Amfibi (Pansam), Sekoci pendarat, Kendaraan Bermotor (Ranmor), *Hovercraft*, dll.

3. Strategi Pembangunan Kekuatan (*Bangkuat*).

Setelah strategi dasar disusun, dilanjutkan dengan tahapan strategi pembangunan kekuatan yang substansinya adalah realisasi "arsitektur makro" dari strategi dasar. Berbeda dengan penyusunan strategi dasar, tahapan strategi pembangunan kekuatan diselenggarakan berdasarkan faktor-faktor dinamis yang berkembang seperti *balance of power* utamanya di regional, ancaman potensial dan faktual yang dihadapi, national interest dan lain-lain, yang dihadapkan kepada ketersediaan anggaran pertahanan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa bukan strategi dasar yang mengikuti anggaran, namun anggaranlah yang mengikuti strategi dasar. Faktor-faktor dinamis yang sangat krusial bagi Indonesia saat ini adalah :

a. Arogansi Malaysia yang secara provokatif telah mengancam kedaulatan, keutuhan dan kewibawaan NKRI di wilayah Perairan Ambalat. Arogansi tersebut telah nyata-nyata dilakukan melalui pengerahan kekuatan lautnya untuk mengganggu pembangunan Suar Karang Unarang. Presiden telah menyatakan bahwa beliau tidak ingin Indonesia dilecehkan dalam hal ini.

b. Doktrin Howard mengenai kebijakan Australian Maritime Information

Zone (AMIZ) sebagai bagian dari kebijakan pertahanan Australia yang meliputi radius 1000 mil laut hingga wilayah Indonesia.

c. Potensi konflik antar negara, utamanya menyangkut 12 pulau-pulau terluar serta mengenai penentuan batas wilayah negara di laut yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan.

d. Ancaman faktual di laut, utamanya menyangkut keamanan laut di Selat Malaka dan ALKI lainnya; Kasus *illegal logging* ; Kasus *illegal fishing* yang dilansir Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menimbulkan kerugian negara mencapai 30 Trilyun pertahun.

Secara universal, *kekuatan militer digunakan* negara untuk kepentingan "*External function*" meliputi *defense, deterrence, coersive* dan *protective* ; serta untuk kepentingan "*Internal function*" meliputi internal *security, civic mission, Search And Rescue* (SAR) dan lain-lain. Mendukung tujuan eksternal negara adalah fungsi sejati dari militer serta memiliki tingkat kesulitan tertinggi karena membutuhkan pelatihan khusus agar menjadi militer profesional, sedangkan mendukung tujuan internal negara adalah fungsi tambahan yang tidak kalah pentingnya namun tidak membutuhkan latihan khusus. Oleh sebab itu, substansi dari Strategi Pembangunan

Kekuatan adalah membangun kekuatan militer agar mampu melaksanakan "*External function*" dan apabila kekuatan militer negara telah mampu melaksanakan "*External function*" maka secara otomatis akan mampu pula melaksanakan "*Internal function*". Pada dasarnya penyelenggaraan strategi pembangunan kekuatan militer (Bangkuatmil) secara universal mengikuti kaidah

teori Henry C.Bartlett tentang "*Approachess to Force Planning*" yang terdiri dari delapan macam pendekatan *Force Planning*. Dari delapan macam pendekatan tersebut, fokus penekanan pada suatu pendekatan di setiap negara belum tentu sama karena tergantung pada situasi dan kondisi dari negara tersebut. Berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia saat ini maka fokus penekanan pendekatan pembangunan kekuatan adalah :

a. Top Down Approach. Dilaksanakan secara "*longer term*" mengacu kepada "Arsitektur makro" (sebagai *guidance*), dengan demikian pembangunan kekuatan pertahanan ruang laut Indonesia akan terarah, diharapkan stabil serta berkesinambungan, sesuai mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg). Untuk itu sangat dibutuhkan komitmen otoritas pilar politik, pilar ekonomi dan seluruh komponen bangsa guna mewujudkannya.

***b. Threat Approach*.** Dilaksanakan dalam bentuk percepatan pembangunan kekuatan karena sifatnya mendesak, dalam rangka mengejar balance of power terhadap kekuatan negara yang dirasakan mengancam. Percepatan pembangunan kekuatan tersebut tetap mengacu kepada "Arsitektur makro", namun yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas Alutsistanya.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sasaran utama strategi pembangunan kekuatan militer bagi negara yang bersifat defensif (tanpa niatan agresi) adalah optimalnya strategi penangkalan (*deterrence*). Prinsip utama untuk memperoleh *deterrence effect* adalah dimilikinya kemampuan melaksanakan *second strike* untuk kontra *pre-emtive strike.* "Kewibawaan negara"

dapat terwujud dengan adanya *balance of power* yang akan memaksa negara bakal lawan berpikir kembali untuk melaksanakan niatnya.

Dalam suatu inovasi strategi militer, *balance of power* tidak selalu diartikan *force on force*, sebagai contoh penerapan strategi peranjauan yang massif, dapat menahan secara efektif dan ekonomis suatu Gugus Tugas laut musuh yang terdiri dari Korvet, Fregate dan lain-lain. Demikian pula dengan Kapal Selam karena untuk menghadapinya minimal dibutuhkan dua kapal atas air yang memiliki kemampuan Anti Kapal Selam (AKS). Berdasarkan strategi dasar dan "Arsitektur Makro" yang dikembangkan, TNI AL melaksanakan strategi pembangunan kekuatan melalui Rancangan Postur TNI AL Tahun 2005 Hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kebutuhan Kekuatan Hingga Tahun 2024. Berdasarkan perhitungan yang komprehensif dan sebijaksana mungkin, TNI AL membutuhkan minimum Alutsista (untuk operasi secara bersamaan) sebagai berikut :

1) KRI.

1. Untuk pengendalian laut di dua *hot area* dibutuhkan 54 kapal, yang terdiri dari 4 SS, 22 PKR, 16 KCR, 8 KCT dan 4 BCM.
2. Untuk proyeksi kekuatan ke darat oleh 3 BTP dibutuhkan 50 kapal yang terdiri dari 6 SS, 11 PKR, 18 AT, 3 BCM, 6 PR dan 6 BAP (Menggunakan standar satu BTP Marinir versi personel 1.745, kebutuhan kapal tabir sesuai teori perhitungan kapal tabir).
3. Untuk penegakan keamanan dan hukum di laut dibutuhkan 44 kapal patroli.

4. Anglamil untuk mendukung 2 BTD dalam satu sorti (Serpas dan Serlog) ke daerah rawan dan daerah perbatasan dibutuhkan 12 kapal yang terdiri dari 8 AT, 3 BAP dan 1 BCM.
5. Untuk kegiatan Surta Hidro-oseanografi dibutuhkan 8 BHO yang terdiri dari 4 *ocean going* dan 4 coastal.

2) Pesud.

1. Untuk pengendalian laut dibutuhkan 15 Pesud, yang terdiri dari 9 *fix wing* (untuk intai taktis dan patroli maritim) dan 6 *rotary wing* (untuk anti permukaan dan anti kapal selam).
2. Untuk proyeksi kekuatan ke darat dibutuhkan 21 Pesud *rotary wing* (12 untuk GKK dan 9 untuk anti permukaan dan anti kapal selam).
3. Untuk penegakan hukum di laut sesuai pola koordinasi dengan kapal permukaan dibutuhkan 8 Pesud *fix wing.*

3) Marinir.

Kekuatan yang dibutuhkan untuk operasi amfibi, operasi anti amfibi dan tugas-tugas lainnya adalah 3 Pasmar, 2 Brigmar BS, 1 Detasemen Jalamangkara dan 5 Lanmar, 1 Satintel dan 11 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan dengan materiel tempur 847 ranpur, 298 meriam dan 86 roket.

4) Pangkalan.

- **Lantamal.** Dengan mempertimbangkan aspek strategis dan dukungan operasional unsur-unsur dibutuhkan tambahan jumlah dan relokasi Lantamal serta peningkatan kemampuan Fasharkan Mentigi, Makassar dan Manokwari.

- **Lanal.** Untuk mendukung konsep pertempuran di laut dan proyeksi kekuatan ke darat sesuai skenario pada dua *hot area,* dibutuhkan peningkatan kemampuan Lanal Palu, Lanal Ranai dan pengembangan Lanal Tahuna dari kelas C menjadi kelasB.
- **Lanudal.** Peningkatan kemampuan Lanudal Manado dan Kupang dari kelas B menjadi kelas A, Lanudal Tual dari kelas C menjadi kelas B dan pembangunan Lanudal di Palu, Biak, Aru dan Ambon.

b. Kekuatan TNI AL Tahun 2024. Selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2024, sejumlah besar Alutsista yang ada akan mengalami *Arm Reducing* karena mencapai maksimal usia pakai. Bila sebagian Alutsista yang belum mengalami *Arm Reducing* ditambahkan dengan jumlah kebutuhan kekuatan hingga tahun 2024 maka kebutuhan kekuatan TNI AL sampai tahun 2024 adalah:

1) KRI.

KRI sejumlah 274 buah terdiri dari :

1. Susunan Tempur Pemukul (*Striking Force*) meliputi 110 kapal dengan susunan: 16 Kapal Perusak Kawal (PK), 40 Kapal Perusak Kawal Rudal/PKR, 10 Kapal Selam (SS), 26 Kapal Cepat Rudal (KCR), 12 Kapal Cepat Torpedo (KCT) dan 6 Kapal Buru Ranjau (BR).
2. Susunan Tempur Patroli (*Patroling Force*) meliputi 66 Kapal Patroli Cepat.
3. Susunan Tempur Pendukung *(Supporting Force*) meliputi 98 kapal dengan susunan : 3 Kapal Markas (MA), 41 Kapal Angkut Tank (AT), 12 Kapal

Penyapu Ranjau (PR), 4 Kapal Angkut Serba Guna (ASG), 6 Kapal Tanker (BCM), 7 Kapal Tunda Samudera (BTD), 8 Kapal Hidro Oseanografi (BHO), 3 Kapal Bantuan Umum (BU), 11 Kapal Angkut Personel (BAP) dan 3 Kapal Latih (LAT).

2) Pesud.

Pesud berjumlah 137 buah terdiri dari 30 Angkut Sedang (14 *fix wing* dan 16 *rotary wing*); 32 Angkut Ringan (*rotary wing*); 36 Patmar;; 30 Heli AKPA dan AKS; 9 Latih (5 fix wing dan 4 *rotary wing*).

3) Marinir.

Kekuatan Marinir terdiri dari 3 Pasmar, 2 Brigmar BS, 1 Kolatmar, Pasusla dan 5 Lanmar, 1 Satintel dan 11 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan dengan materiel tempur; 64.144 Senjata Perorangan, 128 Roket, 793 Meriam, 890 Ranpur, 254 Albes, 3991 Alkomlek, 44 Kapsatlap, 5.529 Ranmor, 103.120 Alkapsus dan 8.948 Aloptik.

4) Pangkalan.

Pangkalan TNI AL berjumlah 59 buah, terdiri dari 11 Lantamal, 24 Lanal, 21 Sional, 3 Denal. Pangkalan Udara TNI AL berjumlah 12 buah, terdiri dari 1 Lanudal kelas A, 9 Lanudal kelas B, 2 Lanudal kelas C. Pos Pengamat TNI AL berjumlah 63 buah, terdiri dari 9 Posal kelas A, 24 Posal kelas B, 30 Posal kelas C. Fasharkan TNI AL berjumlah 9 buah, terdiri dari 6 Fasharkan kelas A, 2 Fasharkan kelas B dan 1 Fasharkan kelas C.

5) Personel.

Personel TNI AL sejumlah 157.056 terdiri dari 20.725 Perwira, 54.711 Bintara, 67.955 Tamtama dan 13.665 PNS.

Dengan adanya perubahan dari sistem lama Sisrenstra menjadi sistem baru yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg) maka TNI AL melaksanakan penyesuaian. Blue Print TNI AL Tahun 2004 hingga Tahun 2013 pada sistem lama ditransformasikan dan dilengkapi ke dalam sistem baru menjadi Rancangan Postur TNI AL Tahun 2005 Hingga Tahun 2024, dengan demikian strategi pembangunan kekuatan TNI AL tetap berkesinambungan.

4. Strategi Penggunaan Kekuatan (Gunkuat).

Strategi Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) menyangkut dua hal pokok yaitu penyebaran kekuatan (*deployment*) dan pengerahan kekuatan (*employment*). Penyelenggaraannya berorientasi kepada dua dimensi keadaan yaitu :

a. Orientasi Masa Perang.

Bila dikaitkan dengan strategi dasar dan “Arsitektur makro” maka substansi *deployment* berikut penyiapan pangkalan, harus bersifat preparatif agar siap digunakan disaat perang (*Preparation for War*). Pangkalan-pangkalan vital utamanya yang berhubungan dengan geostrategi pendekatan corong harus mampu mendukung *employment* menurut strategi tempur yang dikembangkan pada corong strategis tersebut. Hal ini telah diantisipasi TNI AL dalam Rencana validasi organisasi TNI AL yang menyangkut beberapa hal pokok yaitu :

1. Pembentukan Komando Armada RI yang membawahi tiga Komando Wilayah Laut (Kowilla), yaitu Kowilla Barat, Kowilla Tengah dan

Kowilla Timur guna mengantisipasi tiga corong strategis. Dalam melaksanakan perannya, Kowilla akan membawahi Lantamal yang berada di wilayahnya dan Eskader sebagai sub organisasinya.

2. Penambahan jumlah Lantamal yang semula 9 menjadi 11 Lantamal, melalui pembentukan Lantamal baru di Padang dan Merauke.
3. Menata kembali gelar pangkalan dengan merelokasi beberapa Lantamal sehingga lebih ideal dalam mendukung geostrategi pendekatan corong.
4. Pengembangan Korps Marinir (Kormar) menjadi tiga Pasmar yang melekat pada Komando Armada Kawasan dan dua Brigif Marinir untuk mendukung kebutuhan satuan pemukul cadangan strategis dan satuan pengamanan. Mako Pasmar-I di Lhokseumawe, Pasmar-II di Pare-Pare, Pasmar-III di Sorong.

b. Orientasi Masa Damai.

Untuk kepentingan penegakan keamanan dan hukum di laut dimasa damai, TNI AL telah melaksanakan gelar kekuatan meliputi:

1) Gelar Permanen (*Deployment*).

a. KRI.

i. Kekuatan pemukul strategis digelar di Belawan, Tanjung Uban, Surabaya, Palu, Kupang dan Ambon.

ii. Kekuatan Kamla digelar di setiap pangkalan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional.

iii. Kekuatan Anglamil digelar di Jakarta, Makassar dan Sorong.

iv. Kekuatan Surta Hidro-oseanografi digelar di Jakarta.

b. Pesud digelar di Lanudal Sabang, Kijang, Matak, Surabaya, Manado, Palu, Kupang, Aru dan Ambon.

c. Marinir digelar sesuai dislokasi organisasi Kormar, dengan tambahan 1 BTP berada di Belawan, 1 BTP berada di Palu dan 1 BTP berada di Merauke.

d. Pangkalan digelar untuk mendukung kegiatan operasi.

2) Gelar Penindakan (*Employment*).

a. KRI.

i. Kekuatan Kamla digelar di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia untuk menghadapi ancaman pelanggaran hukum.

ii. Kekuatan Anglamil digelar untuk mengantisipasi permintaan Serpas, Serlog

iii. Kekuatan Surta Hidro-oseanografi digelar untuk tugas-tugas penyiapan data untuk mendukung operasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

b. Pesud digelar utamanya untuk mendukung operasi di wilayah *hot area*.

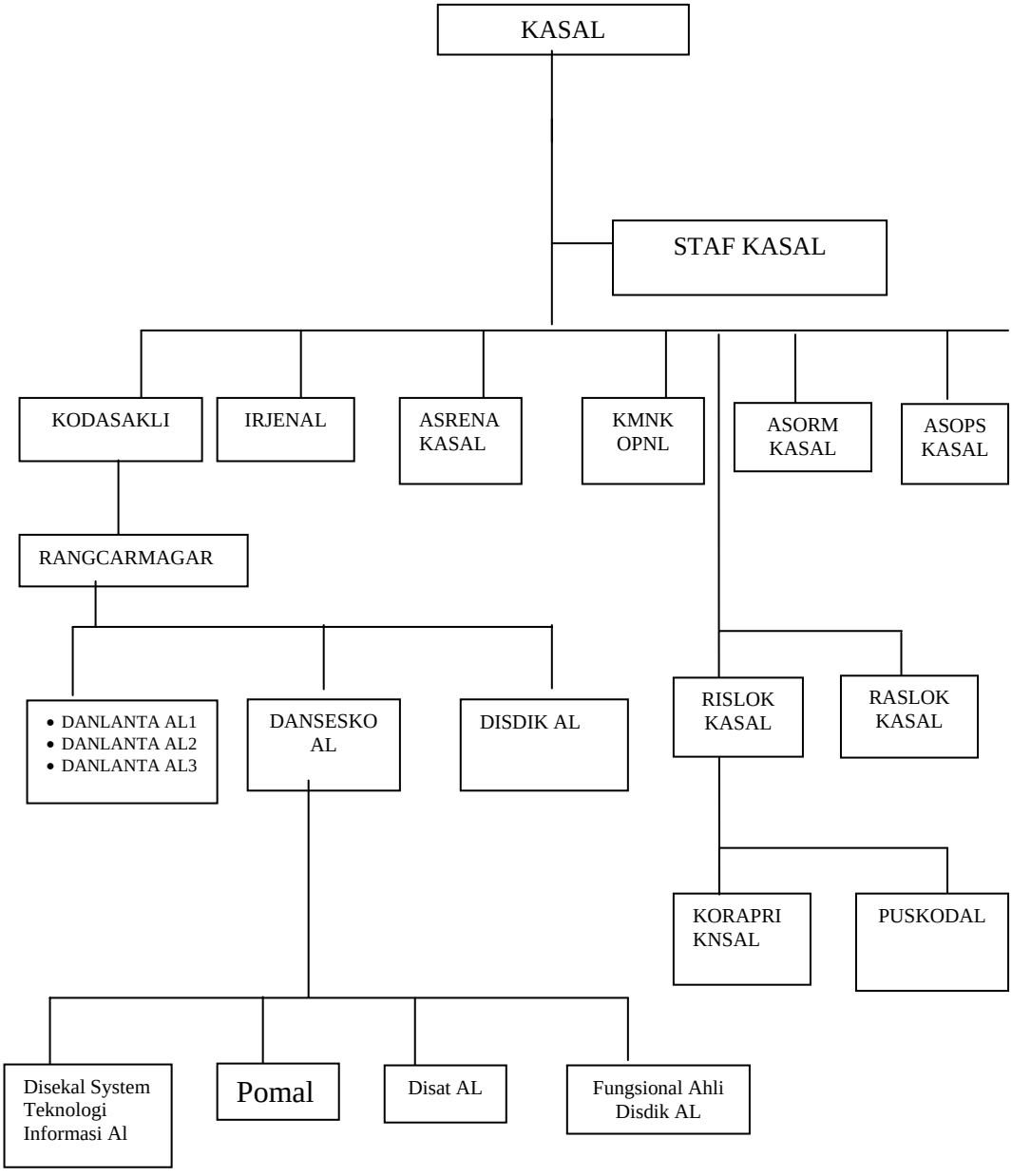
c. Marinir digelar untuk proyeksi kekuatan ke darat, operasi anti amfibi, operasi di daerah rawan dan perbatasan serta bantuan perkuatan TNI kepada Polri dan Pemda sesuai dengan eskalasi konflik.

d. Pangkalan digelar utamanya untuk mendukung kegiatan operasi khususnya di hot area.

5. Penutup.

Disamping bertujuan untuk memaparkan Rancangan Postur TNI AL Tahun 2005 hingga Tahun 2024, tulisan ini sekaligus mengandung gagasan tentang bagaimana mengembangkan strategi pertahanan ruang laut Indonesia secara khusus dan gagasan tentang bagaimana mengembangkan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) secara umum. Kaisar Napoleon Bonaparte (1769-1821) mengatakan bahwa “Strategi pertahanan perlu ditinjau dalam setiap satu dekade” dimana terdapat makna terkandung bahwa dalam kurun waktu satu dekade, kondisi lingkungan strategis negara dapat berubah secara siknifikan. Oleh sebab. Demikian “Rencana Pembangunan Kekuatan Jangka Panjang TNI AL” ini dibuat sekaligus wujud keinginan TNI AL untuk melaksanakan pembangunan kekuatan dengan kriteria ***Green Water Navy.***

2.3. Struktur Organisasi TNI AL



(Referensi dari www.tnial.com)